BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Teori *Idiosyncratic*

Untuk mempelajari *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono, maka perlu menganalisis kepribadiannya baik dari segi profil, karir politik hingga kebijakan-kebijakan selama ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dari aspek-aspek tersebut akan terlihat bagaimana *idiosyncratic* dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dari *idiosyncratic* tersebut akan mempengaruhi segala tindakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana karakter *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan teori Falkowski, maka akan diuraikan sebagai berikut: *nasionalism, conceptual complexity, believe in own control, need for affiliation, distrust of others, need for power* (Falkowski, 1979: 20).

Untuk lebih memperjelas karakter *idiosyncratic* Presiden Yudhoyono yang *active independent* maka akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Nasionalism* : Presiden Yudhoyono merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang, Jawa Tengah tahun 1973. Ayah beliau juga merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketertarikan beliau terhadap tentara sudah terlihat sejak kecil ketika sekolah beliau berdarmawisata ke AMN. Beliau sangat kagum melihat para tentara

berbaris rapih serta kedisiplinan para tentara dan mempunyai cita-cita menjadi tentara seperti ayahnya (www.Isai.or.id/?q=node/18, diakses 05-06-2012). Oleh karena kecintaan Presiden Yudhoyono dengan militer, maka beliau mendapatkan anugerah Bintang Adi Makayasa sebagai tanda lulusan terbaik AMN pada tahun 1973. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan di sekolah militer lebih menanamkan pada rasa nasionalisme yang tinggi terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hali ini pula lah yang menjadikan Presiden Yudhoyono memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara Indonesia, terlebih ayah beliau juga merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga mertua beliau yaitu Letnan Jendral (Purn.) Sarwo Edhi Wibowo yang beliau idolakan merupakan pejabat TNI. Faktor lingkungan serta pendidikan Presiden Yudhoyono yang militer, jelas bahwa beliau dapat dikategorikan memiliki ciri *high nasionalism*.

2. *Believe in own control* : Presiden Yudhoyono merupakan tentara dengan intelektual yang tinggi, salah satu pembuktiannya adalah dengan menjadi lulusan terbaik AMN tahun 1973 dan mendapatkan anugerah Bintang Adi Makayasa. Dalam karir politiknya juga beliau sempat beberapa kali di percaya untuk mengatasi beberapa permasalahan di dalam negeri, beberapa diantaranya adalah beliau diminta membentuk *Crisis Center* oleh Presiden Wahid pada tahun 2001 untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintah pada

waktu itu. Beberapa waktu kemudian, Presiden Abdulrahman Wahid mempercayainya lagi sebagai ketua tim tujuh, yang salah satu tugasnya adalah meredakan ketegangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah memanas pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Presiden Yudhoyono pada waktu itu merupakan wujud dari Presiden Yudhoyono memiliki tingkat inisiatif yang tinggi dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang dianggap perlu dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi pada saat itu. Dengan intelektualitas Presiden Yudhoyono yang tinggi serta sempat beberapa kali di percaya memimpin lembaga untuk menstabilkan kondisi negara pada waktu yang dipercaya oleh Presiden wahid untuk mengambil kebijakan penting dalam kondisi negara pada waktu itu maka beliau dapat dikategorikan memiliki ciri *high believe in own control*

3. *Conceptual complexity* : dalam karir politik Presiden Yudhoyono ada beberapa keputusan penting yang beliau ambil sebagai langkah dalam membawa beliau pada kursi nomor satu di Republik Indonesia ini dalam dua masa periode (2004-2009 dan 20010-2014). Awalnya nama Susilo Bambang Yudhoyono muncul sebagai pendamping untuk Presiden Megawati dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Metro TV, namun kemudian nama Hamzah Haz lah yang terpilih untuk pososi tersebut. Sedangkan Yudhoyono kembali dipercaya menempati pos lamanya sebagai Menko Polkam. Merasa tidak dipercaya lagi oleh Presiden, jabatan Menko Polkam pun

ditinggalkannya pada 11 maret 2004 (Soempeno, 2009: 17-18). Kemudian Yudhoyono mengambil langkah untuk mendirikan partai baru sebagai kendaraan untuk menuju kursi Indonesia satu setelah kalah dalam pemungutan suara sebagai wakil Presiden tahun 2001. Partai Demokrat menjadi kendaraan politik Yudhoyono selanjutnya yang diresmikan pada tanggal 09 Oktober 2001 (www.demokrat.or.id/sejarah/ diakses 27-08-2012).. Inilah bentuk dari kemampuan yang tinggi dari Presiden Yudhoyono dalam menyadari adannya beberapa alternatif pembuat keputusan terutama dalam hal ini yang menyangkut karir politik beliau. Keputusan berani yang diambil Presiden Yudhoyono pada waktu untuk keluar dari "zona nyaman" sebagai menteri dan mendirikan partai Demokrat sebagai kendaraan politik beliau dapat menjadi faktor bahwa beliau memiliki ciri *high conceptual complexity*.

4. *Need for affiliation* : Dalam memimpin Indonesia, Presiden Yudhoyono membawa jalur politik luar negeri Indonesia kearah politik bebas aktif yang berorientasi pada hubungan pertemanan yang di jalin terhadap dua kutub negara besar dunia, yaitu menjalin hubungan baik dengan blok barat (Amerika) serta blok timur (Rusia). Hal ini juga ditunjukkan Presiden Yudhoyono dengan menjalin kerjasama energi nuklir dengan Iran. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Yudhoyono mementingkan hubungan pertemanan tanpa memilih sekutu. Sikap politik luar negeri Presiden Yudhoyono yang menterjemahkan

politik bebas aktif Indonesia sebagai *Million friends and zero anemy* dapat menjadi factor bahwa beliau memiliki ciri *high need for affiliation*

5. *Distrust of others* : Pemerintahan Presiden Yudhoyono merupakan sosok pribadi yang perfeksionis. Oleh karena itu dalam memerintahkan sesuatu terhadap lembaga terkait maka beliau tidak sepenuhnya mempercayakan hal tersebut terhadap lembaga yang diperintahkannya. Maka dari itu beliau turut langsung menangani hal yang di tugaskan kepada lembaga yang diperintahkan dengan melakukan pertemuan-pertemuan dalam membahas hal yang di tugaskan oleh beliau. Termasuk dalam penanganan terhadap peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 dan penanganan terhadap permasalahan TKI di luar negeri (Wawancara, Zainal A. Budiyono. Asisten Staf Khusus Presiden Yudhoyono Bid. Dokumentasi dan Publikasi : 27-08-2012). Berdasarkan sifat Presiden Yudhoyono yang menginginkan kesempurnaan dari setiap hal yang dikerjakan dan diperintahkan kepada jajaran di pemerintahannya dan selalu melakukan pertemuan dan evaluasi dari setiap hal tersebut maka dapat di kategorikan bahwa beliau memiliki ciri *low distrust of others*
6. *Need for power* : Sikap politik luar negeri Presiden Yudhoyono yang lebih mengedepankan *soft power* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan antara Indonesia dan negara lain dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa Presiden Yudhoyono memiliki karakteristik *low need for power* karena beliau tidak berkeinginan untuk mengintimidasi negara lain serta politik luar negeri yang di jalankan Presiden Yudhoyono adalah *million friends and zero*

anemy juga dapat menunjukkan bahwa beliau mempunyai karakteristik *low need for power*. Dari sikap politik luar negeri yang beliau kedepankan yaitu *soft power* dalam menyelesaikan setiap permasalah dengan negara lain tanpa mengintimidasi negara tersebut maka dapat dikategorikan beliau memiliki ciri *low need for power* .

Berdasarkan cirri dari kepribadian politik Presiden Yudhoyono di atas maka dapat di simpulkan bahwa Presiden Yudhoyono memiliki *idiosyncratic* yang *active independent* yang berciri *: high nasionalism, high believe in own control, high conceptual complexity, high need for affiliation, low distrust of others*, dan *low need for power*. Hal ini sesuai dengan teori yang di keluarkan oleh Hermann.dan Falkowski.

Dalam melihat pengaruh *idiosyncratic* seseorang, tentunya terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dapat dilihat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh karakteristik kepribadian politik Presiden Yudhoyono.

Soempeno dalam bukunya “Indonesia Memilih” memberikan gambaran mengenai aspek yang menonjol dari Presiden Yudhoyono sebagai pemimpin politik yang dapat dilihat dalam table berikut :

Table 4.1

Aspek Kepribadian Menonjol Presiden Yuhoyono Sebagai Pemimpin Politik

Aspek Menonjol	Kekuatan	Kelemahan
Sifat moderat, mau berubah	Mampu menerima kritik	Kurang gigih dalam

dengan alasan yang memadai, realistis, menilai tinggi moralitas, memandang manusia setara	dengan argumentasi, mau melakukan perbaikan yang realistis, dan menempatkan tiap orang setara.	memperjuangkan ide-idenya
Mementingkan intelektualitas	Mementingkan intelektualitas	Terlalu banyak pertimbangan sehingga lambat mengambil keputusan
Keterbukaan pikiran	Mampu menyerap dan memahami hal-hal yang berbeda, sebetulnya bisa menggunakan berbagai sudut pandang dalam menyelesaikan masalah	Terkesan ragu-ragu karena menunggu banyak masukan dari pihak lain sebelum membuat keputusan
Pola penalaran sistemik	Pemahaman masalah secara menyeluruh	Lambat membuat keputusan
Kebutuhan prestasi	Pekerja keras, selalu berusaha mendapatkan yang diinginkan dan selalu ingin hasil yang terbaik	Datar secara emosional dan emosi tidak lepas
Kebutuhan afiliasi	Mau mendengar, berusaha memberikan empati, dan senang berdialog	Kurang tegas dan kurang memiliki kontrol terhadap orang
Penampilan yang selalu	Disegani, dituruti, dan	Dapat menimbulkan kesan

terjaga, berwibawa, dan dapat diandalkan	mampu manjadi teladan	berpura-pura dan tidak menampilkan yang sebenarnya

Sumber (Soempeno, 2009: 162).

Memang sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan yang seiring sejalan yang mana hal tersebut akan dapat mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Hal ini tidak terlepas juga dengan Presiden Yudhoyono dalam penagmbilan kebijakannya yang juga di pengaruhi oleh kepribadiannya.

4.2 Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Dalam upaya penyelesaian permasalahan terhadap TKI di Malaysia, Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap perlu sebagai upaya perlindungan terhadap TKI di Malaysia yang telah diperintahkan keberbagai departemen terkait untuk menjalankan instruksi dari Presiden dan diharapkan berbagai kebijakan yang dibuat mampu menyelesaikan permasalahan TKI untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara diluar negeri.

Berbagai kebijakan pendukung juga dikeluarkan tidak hanya perlindungan TKI diluar negeri, namun juga perlindungan TKI didalam negeri. Ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam monitoring jumlah TKI diluar negeri dan

diharapkan mengurangi jumlah TKI ilegal yang nantinya akan merugikan TKI itu sendiri dan berdampak pada kurang maksimalnya perlindungan terhadap TKI yang tidak terdaftar dilembaga resmi atau TKI illegal

. 4.2.1 Inpres No. 6/2006 Mengenai Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pada tahun 2006, Presiden Yudhoyono mengeluarkan inpres no. 6/2006 tentang reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja untuk menanggapi kasus kekerasan TKI di Malaysia. Isi instruksi presiden ini untuk memperkuat fungsi diplomatik Indonesia dalam perlindungan TKI dengan menempatkan atase tenaga kerja di negara-negara tujuan utama bagi TKI. Salah satu atase tenaga kerja ditempatkan di Malaysia.

Dalam inpres ini terdapat lima kebijakan yang dikeluarkan presiden yaitu :

Table 4.2

Kebijakan Dalam Inpres No.6/2006

Kebijakan	Program
1. Penempatan TKI	a. Penyederhanaan dan desentarlisasi pelayanan penempatan TKI b. Peningkatan kualitas dan kuantitas calon TKI c. Pelayanan TKI diembakasi dan debarkasi dengan sistem *one roof service*
2. Perlindungan TKI	a. Advokasi dan pembelaan TKI b. Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan TKI

3. Pemberantasan calo/sponsor TKI	a. Pemberantasan praktek percaloan TKI didaerah b. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI diembarkasi maupun debarkasi.
4. Lembaga penempatan TKI	a. Peningkatan profesionalisme lembaga penempatan TKI
5. Dukungan lembaga perbankkan	a. Fasilitas kresit untuk calon TKI b. Pengelolaan remitansi TKI

Sumber (www.iom.int. diakses 25-01-2012).

4.2.2 Inpres No. 81 tahun 2006 Mengenai Pembentukan BNP2TKI Diluar Negeri

Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 mengatur tentang pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sebagai salah satu aspek pelaksanaan UU No. 39 tahun 2004 bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Presiden menimbang bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait.

Dalam Inpres No. 81 Tahun 2006 Terdiri Dari XI (Sembilan) Bab dan 51 pasal yang mengatur ; kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi, struktur organisasi, eselonisasi, pengangkatan serta pemberhentian, tenaga profesional, pembiayaan organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan, serta penutup.

Dengan adanya Inpres No. 81 Tahun 2006, diharapkan akan mampu melindungi TKI diluar negeri dan secara cepat menangani permasalahan yang dihadapi oleh para TKI diluar negeri dengan baik.

4.2.3 Moratorium Pengiriman TKI

Moratorium dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penagguhan atau penundaan. Dalam kebijakan moratorium mengenai pengiriman TKI ke Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang dikeluarkan sejak tanggal 26 Juni 2009 dan berakhir pada 1 Desember 2011 setelah pemerintah Malaysia sepakat untuk menendatangani “surat kesungguhan” pada bulan Mei 2010, yang berisi tentang pemberian hak-hak TKI dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap para TKI seperti memperoleh hari libur per-minggu serta para TKI berhak menyimpan sendiri paspor mereka selama berada di Malaysia termasuk mendapat kenaikan gaji secara periodik.

Namun proses penempatan serta pengiriman TKI baru akan dilaksanakan pada Maret 2011 seperti yang ditegaskan oleh Muhaimin Iskandar selaku

MENAKERTRANS. Secara prinsip pemerintah Malaysia telah menyetujui langkah-langkah yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia. Namun kenaikan upah minimum TKI yang diajukan pemerintah Indonesia yang sebelumnya sebesar 500 Ringgit menjadi 800 Ringgit belum menemui kesepakatan dengan pemerintah Malaysia.

Upaya memperjuangkan hak bagi para TKI yang dipimpin oleh KEMENAKERTRANS tidak terlepas dari peran Presiden Yudhoyono yang menugaskan pada KEMENAKERTRANS untuk mengemban tugas tersebut, setelah pada pertemuan bilateral kedua negara dalam forum konsultasi tahunan yang membahas isu-isu bilateral kedua negara presiden Yudhoyono mendesak pemerintah Malaysia untuk mematuhi KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filippina tahun 2007 dimana para pemimpin ASEAN menandatangani deklarasi perlindungan dan promosi hak-hak tenaga kerja.

4.2.4 Pembentukan SATGAS Perlindungan TKI

Permasalahan dalam bentuk tindak kekerasan yang sering menimpa para TKI di Malaysia serta tuntutan dari berbagai kalangan yang kurang puas dengan kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya diluar negeri membuat presiden Yudhoyono memngeluarkan Kepres No. 17/2011 tanggal 17 Juli 2011 untuk membentuk Satuan Tugas (satgas) perlindungan TKI dibawah koordinasi KEMENKO POLHUKAM.

Satgas ini merupakan organisasi *ad hoc* yang bertugas selama 6 bulan untuk membantu memperjuangkan penyelesaian permasalahan TKI khususnya dibidang hukum, namun masa tugas satgas ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

akan perlindungan hukum bagi para TKI diluar negeri (setkab.go.id. diakses 02-02-2012).

Dari hasil pencapaian kinerja Satgas di Malaysia hingga awal januari 2012 terdapat 14 orang di Malaysia yang sudah terhindar dari hukuman mati (6 orang bebas murni, 8 lainnya divonis penjara) (http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum diakses 14-08-2012).

4.3 Faktor *Idiosyncratic* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yang *Active Independent* Dalam Pengambilan Kebijakan Terhadap Penyelesaian Permasalahan TKI Di Malaysia

Bardasarkan klasifikasi tipe kepribadian pada menurut G. Hermann, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tipe yang berorientasi pada *Active Indepenent*, yang mempengaruhi pengambilan kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *High Nasionalism*. Rasa cinta dan memiliki bangsa Indonesia, Hal ini pula lah yang mendasari Presiden Yudhoyono untuk membentuk Satgas yang ditugaskan untuk memberi bantuan hukum terhadap TKI yang sedang mengalami permasalahan hukum di Malaysia, dan juga mengeluarkan kebijakan pembentukan BNP2TKI di luar negeri yang di harapkan akan dengan cepat membantu permasalahan TKI di Malaysia.

2. *High Believe In Own Control*. Dalam hal ini dengan keterbukaan pikiran dan sikap dasar kepemimpinan yang transformatif yang merupakan salah satu aspek yang menonjol dari kepribadian politik presiden Yudhoyono dapat dimengerti bahwa jalur diplomasi yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dapat mempengaruhi pemerintahan Malaysia untuk menandatangani "surat kesungguhan" dalam memperjuangkan hak-hak bagi TKI di Malaysia.

   Selain itu dikeluarkannya beberapa kebijakan untuk melindungi para TKI di Malaysia yang merupakan inisiatif langsung dari Presiden Yudhoyono adalah:

   - Dikeluarkannya Inpres No.6/2006 mengenai kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
   - Inpres No.81/2006 mengenai pembentukan BNP2TKI di luar negeri
   - Moratorium pengiriman TKI
   - Kepres No.17/2011 mengenai pembentukan Satgas Perlindungan TKI

   Kebijakan diatas yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Yudhoyono membuktikan bahwa Presiden Yudhoyono memiliki inisiatif yang tinggi dalam pengambilan keputusan.

3. *High Conceptual Complexity* (memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyadari adanya beberapa alternatif pembuat keputusan). Presiden Yudhoyono konsisten mengedepankan *soft power* dalam menyelesaikan berbagai masalah. Menurut presiden Yudhoyono, konflik yang terjadi di

banyak negara akan sulit mencapai solusi damai jika masing-masing pihak mengedepankan *hard power*. Dalam permasalahan mengenai TKI di Malaysia, Presiden Yudhoyono dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dalam kasus ini. Fakta 2,2 juta TKI di Malaysia menjadi pertimbangan tersendiri. Prinsipnya sederhana.TKI tak boleh menjadi korban ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia. Disisi lain, sebagai *big brother* dan negara terbesar di ASEAN, reaksi berlebihan dari Indonesia bisa memicu ketegangan kawasan. Walaupun masyarakat Indonesia menuntut permintaan maaf dari Malaysia atau bahkan konfrontasi. Seorang mantan duta besar (Dubes) menjelaskan bahwa posisi Indonesia di mata negara-negara Asia Tenggara sangatlah penting. Indonesia dianggap sebagai negara yang sudah dewasa dalam diplomasi sehingga sikapnya benar-benar ditunggu oleh kawasan (Budiyono.2012: 76-77).

Diplomasi *soft power* yang ditunjukkan oleh presiden Yudhoyono dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalah TKI di Malaysia menunjukkan bahwa ada alternative lain dalam pengembilan kebijakan luar negeri selain menggunakan *hard power* dalam penyelesaian masalah dengan Malaysia walau pun banyak pihak di dalam negeri menginginkan konfrontasi dengan Malaysia.

4. *Low Distrust Of Others* (mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap orang lain). dalam penanganan masalah TKI, selain Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan lembaga pemerintahan terkait dalam mengatasinya, beliau

juga turut langsung mengatasi permasalahan TKI dengan bertemu langsung dengan PM Malaysia dalam memanfaatkan forum konsultasi tahunan yang membahas berbagai isu-isu bilateral kedua negara. Hal ini bisa menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak sepenuhnya percaya terhadap lembaga negara yang mengurusi permasalahan TKI sehingga Presiden Yudhoyono merasa perlu untuk turun langsung dalam mengatasi permasalah TKI tersebut.

5. *High Need For Affiliation.* Cara *soft power* dalam diplomasi yang diterapkan oleh Presiden Yudhoyono. Konsep kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah *all direction foreign policy* dengan mengangkat slogan "mencari sebanyak mungkin teman dan menghindarkan permusuhan (*million friends and zero enemy*) (www.indonesiarayanews.com/refleksi-polugi-indonesia-kesemua-penjuru. diakses tanggal 14-08-2012). termasuk dalam hal penanganan masalah TKI di Malaysia, Presiden Yudhoyono bertemu langsung dengan PM Malaysia, salah satunya dalam forum konsultasi tahunan yang membahas isu-isu yang sedang dihadapi oleh dua negara serta membahas mengenai penyelesaian masalah serta peluang-peluang kerjasama yang bisa di kembangkan oleh dua negara. Dalam pidatonya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 1 September 2010 dalam menyikapi permasalahan TKI mengatakan "hubungan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjalin ratusan tahun. Kiat punya tanggung jawab sejarah, untuk memeliahara dan melanjurkan tali persaudaraan ini dan mungkin paling erat

di banding negara lain" (http://www.detikpos.net/2010/09/presiden-sby-ingatkan-indonesia.html, diakses pada tanggal 08 oktober 2011).

6. *Low Need For Power* (mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang rendah). Dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menerapkan politik bebas aktif yang berorientasi pada pertemanan dan bukan pada meng-intervensi sebuah negara. Terbukti dalam politik luar negerinya menyangkut permasalahan TKI di Malaysia yang mengedepankan jalur diplomasi dan bukan *power*, termasuk bertemu langsung dengan PM Malaysia yang membahas perlindungan terhadap TKI saat melakukan kunjungan kenegaraan di Malaysia. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono untuk membahas perlindungan terhadap TKI diaharapkan mampu untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan TKI. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak menginterfensi pemerintah Malaysia atau mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang rendah terhadap pemerintahan Malaysia dalam hal perlindungan TKI, ini dikarenakan kesepakatan dalam hal perlindungan TKI disepakati oleh dua belah pihak.

Keterangan diatas juga diperkuat oleh salah seorang Asisten Staf Khusus Presiden Yudhoyono Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Zainal A. Budiyono.

4.4 Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya ibarat hubungan kakak dan adik yang terkadang harmonis dan juga terkadang sedikit memanas. Oleh karena itu berbagai kalangan menganggap bahwa bila ada hubungan yang kurang harmonis antara kedua negara ini tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu terlalu reaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dapat ditempuh dengan cara diplomasi.

Dua negara yang bertetangga dan satu rumpun ini dapat menjadi sebuah kekuatan baru di ASEAN khususnya dan menjadi pilar penting dikawasan. Dengan baiknya hubungan dua negara tersebut maka diharapkan stabilitas dikawasan dapat terjaga.

Berbagai masalah yang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia tersebut memang sejauh ini tidak terlalu mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Permasalah juga sering terjadi karena kesalahpahaman dan pemberitaan yang terlalu berlebihan oleh beberapa media di Indonesia sehingga menggiring opini negatif dari masyarakat Indonesia. Namun pada tingakat pemerintahan, permasalahan tersebut tidak terlalu mengganggu harmonisasi hubungan kedua negara dan diplomasi selalu dipilih sebagai jalan terdepan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk permasalahan terhadap TKI di Malaysia.

4.4.1 Langkah-Langkah Damai Dalam Penyelesaian Masalah TKI

Seperti yang telah sering peneliti ungkapkan serta pemberitaan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik dan penuturan dari pegawai kementrian luar

negeri bahwa langkah diplomasi manjadi langkah utama dalam jalur penyelesaian terhadap berbagai masalah yang menyangkut para TKI di Malaysia.

Berbagai langkah penyelesaian masalah dalam jalur diplomasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait serta termasuk pertemuan bilateral kepala negara serta memanfaatkan pertemuan multilateral.

1. Pertemuan bilateral
    a. Seperti yang dikutip dari detikpos yang diakses pada tanggal 08 Oktober 2011 yang lalu, memberitakan mengenai kunjungan Presiden Yudhoyono ke negeri Jiran itu dan berhasil mencapai kesepakatan mengenai pemberian dan perlindungan mengenai hak bagi TKI di Malaysia.
    b. Forum konsultasi tahunan antara dua negara juga dimanfaatkan Presiden Yudhoyono untuk membahas penyelesaian permasalah TKI di Malaysia, seperti forum konsultasi tahunan ke-8 yang diadakan di pulau Lombok pada 20 Oktober 2011.
    c. Di sela-sela pertemuan multilateral juga upaya diplomasi terus dilakukan pemerintah Indonesia seperti pada pertemuan *International Labour Conference* (ILC) ke-98 di Jenewa Swiss antara menteri tenaga kerja dan transmigrasi waktu itu Erman Suparno dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk S. Subramaniam. Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat untuk segera membahas perbaikan perjanjian kerjasama (MoU) guna meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia

untuk mencegah terualngnya kasus seperti yang menimpa Siti Hajar (beritasore.com diakses tanggal 01-02-2012).

2. Nota kesepahaman (MoU)

   Nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada bulan mei 2010 merupakan langkah damai dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa TKI dan diharapkan kasus-kasus yang pernah dihadapi oleh TKI di Malaysia tidak terulang atau setidaknya dapat diminimalisir serta perlindungan terhadap TKI di Malaysia bisa ditingkatkan.

Pemilihan jalur diplomasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan antara Indonesia dan Malaysia yang di pilih oleh Presiden Yudhoyono saat ini dianggap sangat rasional. Karena, sesama negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia terikat pada piagam bersama yang salah satu butirnya berisi menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik antar negara di Asia Tenggara (Budiyono, 2012: 71).

Dengan pemilihan jalur diplomasi dalam penyelesaian permasalahan mengenai TKI di Malaysia maka diharapkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia kedepannya akan lebih baik dan setiap permasalah yang dihadapi oleh dua negara dapat diselesaikan dengan cara-cara damai.